



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**NURLIANI APRILA
11527202344**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M



**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**NURLIANI APRILA
11527202344**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah"*

Nama : Nurliani Aprila

NIM : 11527202344

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2019

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH. MH
NIK. 13027038

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN**" yang ditulis oleh :

Nama : NURLIANI APRILA
NIM : 11527202344
Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

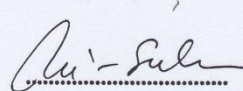
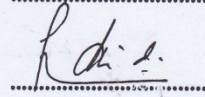
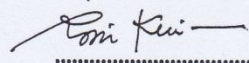
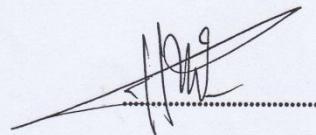
Pekanbaru, 9 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL

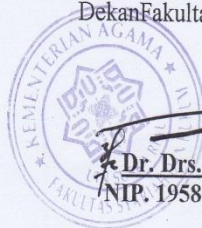
Sekretaris
Roni Kurniawan SH., MH

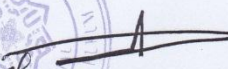
Penguji 1
Lovelly Dwina Dahren, SH., MH

Penguji 2
Hj, Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nufliani Aprila (2019) : Pelaksanaan Pemberi Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan PKH terdiri dari kriteria pendidikan, kriteria kesehatan dan kriteria kesejahteraan sosial. Adapun permasalahan yang penulisan teliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan PKH khusus kesejahteraan sosial di Desa Pulau Godang Kari masih banyak masyarakat Desa Pulau Godang kari yang belum mendapatkan bantuan PKH. 29 masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH, tetapi 4 orang yang kriteria kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan PKH.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, serta bagaimana dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum secara sosiologis, dimana teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemberian bantuan kesejahteraan sosial belum terlaksana sepenuhnya. Karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di Desa Pulau Godang Kari untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan PKH dilakukan dengan musyawarah oleh perangkat desa. Keterbatasan penerimaan bantuan kesejahteraan sosial, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Desa Pulau Godang Kari. Kewajiban untuk penerima PKH kriteria kesejahteraan sosial tidak terlaksana, dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun untuk lansia yang berumur 60 tahun ke atas.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil'amin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Mentrian Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta dan semoga selalu dalam limpahan kasih Allah SWT Ayah dan Amak yaitu Impis dan Zulmainar, S.Pdi. Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang selalu diberikan serta telah menjadi orangtua yang hebat dan pengertian bagi peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Nur Hidayat, SH. MH, selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Bapak Asril, S.Hi. MH, selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah Ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
12. Kepasa Stevi Yelpia dan Khafiz Al-Farisi, Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang selalu diberikan

serta telah menjadi saudara selaku teman yang hebat dan pengertian bagi peneliti.

13. Kepada Idolah, S.H yang banyak membantu peneliti dalam pelaksanaan perkuliahan hingga akhir. Kesabaran dan ketegaran beliau dalam menghadapi tingkah laku peneliti dan memberikan semangat, restu dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu hukum angkatan 2015 terkhususnya IH 4 terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi peneliti.
15. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau di Desa. Geringging Jaya Kecamatan Santajo Rara, yang telah bersama-sama selama menjalani masa kukerta dan telah banyak mengukir kisah. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis,

NURLIANI APRILA
NIM. 11527202344

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Kecamatan Kuantan Tengah.....	18
B. Sejarah Desa Pulau Godang Kari	18
C. Kondisi Sosial Relegius Masyarakat Pulau Godang Kari .	19
D. Kondisi Demografis Desa Pulau Godang Kari	20
E. Kondisi Sosial Desa Pulau Godang Kari	20
F. Visi dan Misi Desa Pulang Kari	21
G. Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa(SOPD)	23
BAB III TINJAUAN TEORITIS	31
A. Negara Hukum Kesejahteraan	31
B. Kebijakan (<i>Freies Ermessen</i>)	38
C. Hak	45
D. Kesejahteraan Sosial	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pelaksanaan Pemberiaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018	

	Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pulau godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.....	63
B.	Dampak Pelaksanaan Pemberiaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pulau godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Populasi dan Sampel	13
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Pulau Godang Kari..	20
Tabel 2.2	Data anak yang menempuh pendidikan di Desa Pulau Godang Kari	20
Tabel 2.3	Pekerjaan Masyarakat Di Desa Pulau Godang Kari	21
Tabel 4.1	Jumlah Dana Bantuan Masyarakat Menerima Bantuan PKH	63
Tabel 4.2	Jumlah Orang yang Mendapat Bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari.....	65
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan tentang Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Kesejahteraan So- sial di Desa Pulau Godang Kari	68
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Mengenai Membantu/Tidak Ke- hidupan Masyarakat dengan Mendapatkan Bantuan Kese- jahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari	69
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Tentang Kelancaran Penerimaan Bantuan Dana PKH di Desa Pulau Godang Kari.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Struktur Organisasi Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah	23
------------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945² menyebutkan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara*”, oleh karena itu di keluarkanlah Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang PKH untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³

Program Keluarga Harapan (PKH) ini di berikan ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) akses yaitu program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara

¹ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.1, h. 29- 34.

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkoordinasi secara khusus. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.⁴ Agar masyarakat yang terpencil sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi lebih baik.

“Jumlah bantuan PKH yang di dapat oleh masyarakat itu di hitung berdasarkan beban keluarga. Dan pada tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ini di pukul rata,” kata Mentri Sosial Agus Gumiwang di Komplek Istana Kepresidenan. Adanya ibu hamil/anak balita, lansia, dan anggota keluarga dengan disabilitas mendapat bantuan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) per jiwa per tahun.⁵

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Mentri Sosial 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa yang mendapatkan sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir meiskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pasal 3 tersebut komponen-komponen dari PKH ini mempunyai beberapa kriteria. Ini termuat dalam pasal 5 ayat 1, 2 dan 3.

(1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 1 tentang Program Keluarga Harapan *Op. Cit*

⁵ https://www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/204078-jumlah-bantuan-pkh-dihitung-berdasarkan-beban-keluarga

(2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.⁶

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan kriteria komponen kesejahteraan sosial mendapat kewajiban untuk melaksanakan komponen yang berupa:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, menupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.⁷

⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan. *Op. Cit*

Bantuan Dinas Sosial ini di fokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang ada.⁸

Sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 (dua) yang berbunyi “*Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmu*”. Kata “kemakmuran” diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniah. Secara lebih luas kemakmuran diartikan tercapainya tingkatan harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi yang meliputi unsur kodrat manusia.⁹

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 11 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa. Luas wilayahnya mencapai 5.259,3g km² dan jumlah penduduk 326.266 jiwa di tahun 2019 dengan sebaran 62 jiwa/km². Salah satu yang kecamatan yang ada di Kuantan Singingi adalah Kecamatan Kuantan Tengah

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan *Op. Cit*

⁸ Suci Sang Lestari, “Upaya Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mempublikasikan Program Keluarga Harapan” Skripsi Fakultas Dakwa, (Pekanbaru: Fakultas Dakwa, 2016), h. 5.

⁹ Kealan, m.s, “Pendidikan Pancasila”. (Yogyakarta: pradigma offset, 2010), h. 153-158.

mempunyai 23 kelurahan/desa dimana mempunyai jumlah penduduk 32.384 jiwa. Salah satu desanya adalah Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁰

Desa Pulau Godang Kari mempunyai jumlah penduduk 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) jiwa dan terdapat 347 Kartu Keluarga (KK) terdiri 3 (tiga) Rukun Warga (RW), 7 (tujuh) Rukun Tetangga (RT) dan 8 (delapan) orang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari segi pekerjaan mayoritas penduduk di Desa Pulau Godang Kari adalah petani.¹¹ Di Desa Pulau Godang Kari penduduk yang berprofesi sebagai petani ada sekitar 80%, buruh 5% dan 15% adalah pegawai.

Masyarakat Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mendapat bantuan PKH sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang mana terbagi menjadi beberapa aspek, dimana untuk lansia berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas yang mendapat Program Keluarga Harapan hanya 4 (empat) orang dan 25 (dua puluh lima) untuk pendidikan.¹²

Pelaksanaan program pelayanan sosial sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial baik berupa bentuk pemberian bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial.¹³

¹⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kuantan_Singingi

¹¹ Data dari Kantor Desa Pulau Godang Kari

¹² Sumber: Kantor Desa Pulau Godang Kari

¹³ Edi Suharto, "*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*", (Bandung: Alfabeta.CV, 2013), h. 11.

Dinas Sosial sebagai mengemban tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus menjalankan tanggung jawabnya secara adil, jujur dan menjalankan pelaksanaan program pelayanan sosial secara merata serta diharapkan dengan adanya salah satu pelaksanaan kebijakan bantuan sosial berupa program desa yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat memajukan Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Desa Pulau Godang Kari.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang masih dihadapi oleh masyarakat Desa Pulau Godang Kari. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kemiskinan mengacu pada keterbatasan dalam hal penghasilan dimana per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.¹⁴

Dengan adanya PKH maka masyarakat yang mendapatkan bantuan ini harus mempunyai syarat tertentu agar bisa terdaftar dan mendapatkan bantuan tersebut guna untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin yang dapat menjalani hidup lebih baik dan mudah untuk kedepannya.¹⁵ Bantuan yang dimaksud yaitu berupa uang, barang dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

¹⁴ *Jurnal Wacana Kinerja* | Volume 21 | Nomor 1/ Juni 2018 73 “Per kapita per bulan adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Garis Kemiskinan Indonesia untuk penduduk perkotaan adalah Rp400.995 per bulan. Menurut data BPS Maret 2016. Jika di bagi 30 hari maka rata-rata belanja orang miskin adalah Rp. 13.366,-.

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 1 tentang Program Keluarga Harapan *Op. Cit*

Pada tingkat pemerintah daerah, banyak kasus dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan secara ideal dalam UU yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.¹⁶

Secara sosiologis sebab-sebab timbulnya kemiskinan adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi.¹⁷

Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini yakni mengenai kapasitas data kelayakan peserta PKH. Masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai (Rumah Tangga Sangat Miskin) RTSM. Sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai RTSM tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH artinya pendataan dan penentuan prioritas sasaran dan program ini belum tepat sasaran. Banyaknya lansia yang berumur 60 (enam puluh) tahun dan di sabilas di Desa Pulau Godang Kari hanya 4 (empat) orang lansia yang mendapatkan PKH tersebut. Tercatat lebih kurang 50 orang lansia yang berumur 60 (enam puluh) tahun dan 3 orang penyandang disabilitas dan salah satunya penyandang disabilitas berat.¹⁸

¹⁶ Abu Samah, "*hukum kebijakan publik*", (Pekanbaru, 2018), h. 1.

¹⁷ Rianto Adi, "*Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*". (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 76.

¹⁸ Neti, Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), *Wawancara*, Desa Pulau Godang Kari. 14 Januari 2019

Dilihat dari segi keadaan lansia yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas dan penyandang disabilitas ini kebanyakan tinggal sendiri atau dengan keluarganya, tetapi kurangnya partisipasi pemerintah untuk memberikan bantuan PKH ini kepada lansia yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas dan penyandang disabilitas.

Persoalan lain berkaitan dalam melaksanakan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan kriteria komponen kesejahteraan sosial, bahwa lansia berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mendapatkan kewajiban berupa: *Dan untuk lansia berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.*¹⁹ Pada kenyataannya tidak ada dinas sosial memberikan makan yang bergizi kepada lansia yang berumur 60 (enam puluh) ke atas dan juga tidak mendapatkan perawatan bagi lansia berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Hasil wawancara penulis dengan (Bapak Impis), ia menyatakan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum tersentuh secara keseluruhan oleh Dinas Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dijalankan

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan *Op. Cit*

oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi bahwa di Desa Pulau Godang Kari masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan sosial untuk lansia di atas 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas. Karena di Desa Pulau Godang Kari lebih terfokuskan kepada kriteria pendidikan dan untuk kriteria bagian kesehatan, tetapi untuk kriteria kesejahteraan sosial kurang di terapkan.²⁰

Jika belum tersalurkannya bantuan kesejahteraan tersebut, bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, oleh sebab itu masyarakat harus di perhatikan secara menyeluruh agar tercapainya tujuan dari PKH tersebut.

Dengan adanya pendamping PKH ini di harapkan masyarakat yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan penyandang di sabilitas di harapkan bisa di perhatikan lebih baik lagi dan dapan membantu memperjuangkan hak-hak dari peserta PKH, baik dalam bentuk mendapatkan haknya sebagai peserta PKH maupun hak lain dalam bantuan sosial yang di berikan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Raskin, Rumah Layak Huni.²¹

Berkaitan dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”**

²⁰ Impis, Ketua RW 001 Penduduk Desa Pulau Godang kari, *Wawancara*, Desa Pulau godang kari, 15 Februari 2019

²¹ Royan, *“Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH”*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial. 2015), h. 10.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melihat ada beberapa hal yang menjadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?
2. Bagaimana dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

- b. Untuk mengetahui dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan efektifitas

²² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

hukum, dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yaitu data yang diperoleh lapangan yang dilakukan baik melalui *Observasi* (pengamatan) maupun Wawancara dan angket.

Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk melakukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pulau Godang Kari, Kenegrian Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kejanggalan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

3. Subek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Godang kari, Ketua RW Desa Pulau Godang kari, Kepala Dinas Sosial, dan Masyarakat di Desa Pulau Godang Kari berdasarkan Kriteria Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang

²³ Amirudin Dan Zainal Asikin, “*Pengantar Penelitian Hukum*“, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h. 25.

Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁴ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Godang Kari, Ketua RW Desa Pulau Godang Kari, Kepala Dinas Sosial, dan Masyarakat di Desa Pulau Godang Kari berdasarkan Kriteria Kesejahteraan Sosial.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵

Tabel 1.1
Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Sosial Kuantan Singingi	1	1	100%
2	Kepala Desa Pulau Godang Kari	1	1	100%
3	Ketua RW di Desa Pulau Godang Kari	3	3	100%
4	Lansia berumur 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas	60	31	51%
	Jumlah	56	36	

Sumber: kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan Kantor Desa Pulau Godang Kari.

²⁴ Zainuddin Ali, “*Motode Penelitian Hukum*”, (Sinar Grafika: jakarta, 2014), h. 98.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 106.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:²⁶

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan dengan wawancara, obeservasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan data yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut di bagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak di kodifikasi seperti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku taks, jurnal ilmiah, surat kabar(koran) dan berita internet.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 175-176.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Obsevasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendaptkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kepala Desa Pulau Godang Kari, Ketua RW Desa Pulau Godang Kari, Kepala Dinas Sosial, dan Masyarakat di Desa Pulau Godang Kari.
- c. Angket, yaitu merupakan suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat data yang ada dan terkait dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskrip kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secaa tertulis atau lisan dan prilakunya. Penarikan kesimpulan digunakan metode Induktif yang mana

cara penarikannya kesimpulan dilakukan dari yang bersifat khusus, kemudian data tersebut di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasa tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab yang memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teoritis, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum penelitian, terdiri dari: Geografis dan Demografis, Pendidikan, Agama, Sosial Ekonomi dan Pekerjaan Desa Pulau Godang Kari.

BAB III: Tujuan Teoritis ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi pelaksanaan, dan dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat uraian bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, serta dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah dengan Ibu Kota Teluk Kuantan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 270.74 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 52.594 jiwa. Kecamatan Kuantan Tengah terdiri dari 20 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun nama ke 20 Desa dan 3 Kelurahan tersebut adalah:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Desa Jake | 13. Desa Koto Tuo |
| 2. Desa Sawah | 14. Desa Pulau Kedundung |
| 3. Desa Sitorajo | 15. Desa Titian Modang |
| 4. Kel. Sungai Jering | 16. Kel. Pasar Taluk |
| 5. Desa Kopah | 17. Desa Pulau Godang Kari |
| 6. Desa Bandar Alai | 18. Desa Beringin Taluk |
| 7. Kel. Simpang Tiga | 19. Desa Seberang Taluk Hilir |
| 8. Desa Jaya | 20. Desa Seberang Taluk |
| 9. Desa Munsalo | 21. Desa Pintu Gobang Kari |
| 10. Desa Koto Taluk | 22. Desa Koto Kari |
| 11. Desa Pulau Baru | 23. Desa Pulau Banjar Kari |
| 12. Desa Pulau Aro | |

B. Sejarah Desa Pulau Godang Kari

Setelah Republik Indonesia menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan pula. Selain itu juga dengan keluarnya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemekaran Desa dan disahkan pada tahun 1980 maka kenegarian Kari di mekarkan menjadi 4 desa, salah satunya adalah Desa Pulau Gadang kari, Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada awal pemekaran Desa Pulau Godang Kari jumlah penduduknya hanya sekitar 980 jiwa dengan potensi desa yang bersumber dari pertanian dengan persentase 95% penduduk yang berprofesi sebagai petani 5% sebagai Pegawai, Pedagang dan Swasta.

Dengan terbentuknya Desa Pulau Godang Kari maka mulailah potensi desa di bangun secara berangsur-angsur, mulai dari pembangunan gedung Kantor Kepala Desa dan tahap demi tahap dilakukan pembenahan baik dibidang Infrastruktur maupun dibidang lainnya yang terkait dengan bidang pembangunan yang berkelanjutan.²⁷

C. Kondisi Sosial-Religius Masyarakat Desa Pulau Godang Kari

1. Penduduk

Desa Pulau Godang Kari mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 2705 (dua ribu tujuh ratus lima) orang, terdiri dari laki-laki 1505 orang, dan perempuan 1200 orang. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel berikut:

⁴⁴ RPJM Desa Pulau Godang Kari 2016-2021

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Pualu Godang Kari

No	Nama RT	Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun Ceberlin	658	450
2	Dusun Sumur Jernih	381	321
3	Dusun Ambacang Gading	466	429

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2019

2. Keagamaan

Desa Pulau Godang Kari mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan mempunyai tempat ibadah mesjid sebanyak 3 buah.

D. Kondisi Demografi Desa Pulau Godang Kari

a. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Letak geografi Desa Pulau Godang Kari, terletak diantara:

Sebelah Utara : Kelurahan Sungai Jering.

Sebelah Timur : Kelurahan Simpang Tiga.

Sebelah Selatan : Desa Pulau Kedundung.

Sebelah Barat : Koto Kari

E. Kondisi Sosial Desa Pulau Godang Kari

1. Pendidikan

Tabel 2.2
Data anak yang menempuh pendidikan
di Desa Pulau Godang Kari

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK/ PAUD	34 Orang
2	SD/ MI	180 Orang
3	SLTP/ Mts	45 Orang
4	SLTA/ MA	30 Orang
5	S1/Diploma	20 Orang
6	Putus Sekolah	9 Orang
7	Buta Huruf	5 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2019

2. Kondisi Ekonomi

a. Struktur Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat Desa Pulau Godang Kari adalah petani. Ada juga sebagian yang berprofesi sebagai Pedagang, PNS, Buruh, Swasta, Peternak. Dan untuk jelasnya tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pekerjaan Masyarakat Desa Pulau Godang Kari

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	450 orang
2	Pedagang	45 orang
3	PNS	65 orang
4	Buruh	25 orang

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Godang Kari 2019

F. Visi dan Misi Desa Pulau Godang Kari

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses perkembangan di desa, partisipasi

masyarakat, sikap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pulau Godang Kari dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Desa Pulau Godang Kari:

“ Terwujudnya masyarakat Desa Pulau Godang Kari yang aman, tentram, agamis, maju, sejahtera, makmur, bermatahat dan berkeadilan”

Misi desa pulau godang kari:

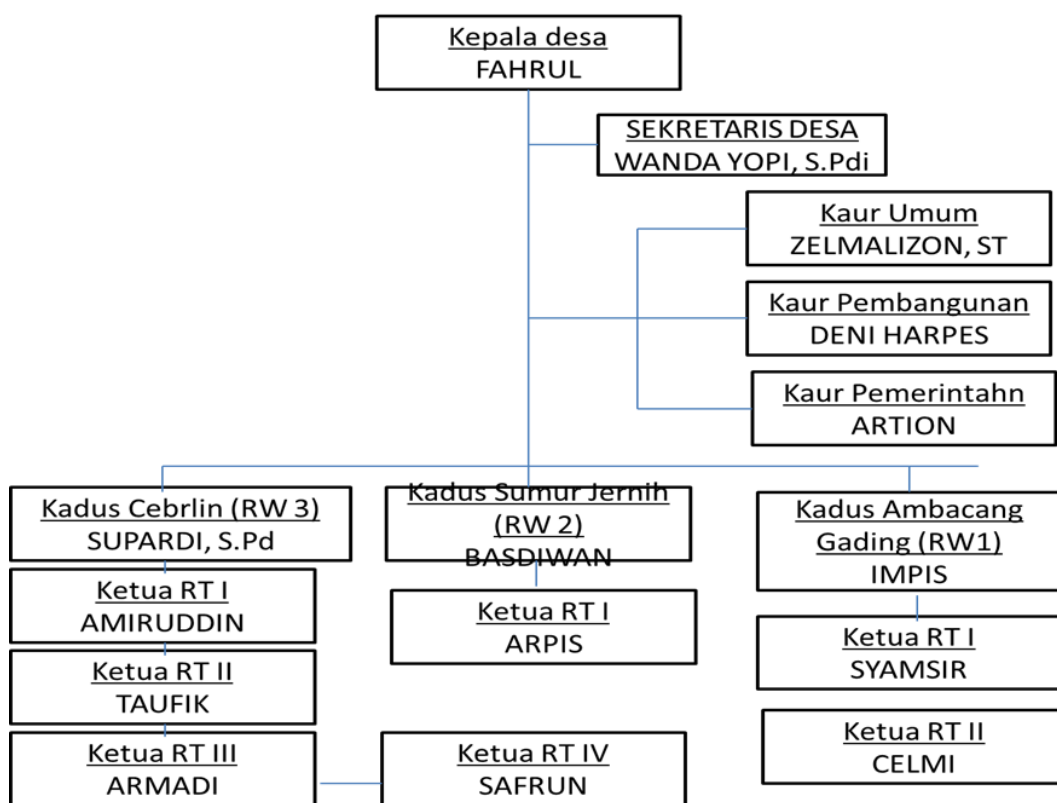
Untuk mewujudkan visi tersebut maka di tetapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut :

1. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan ekonomi kerakyatan
2. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Pulau Godang Kari yang aman, tertib, rukun dan kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi, ringan sama dipikul berat sama dijinjing.
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Pulau Godang Kari yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan primer kepada masyarakat yaitu cepat, tepat dan benar serta pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong.

G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur organisasi Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar berikut:

Gambar 2.1
Skema Struktur Organisasi Desa Pulau Godang Kari,
Kecamatan Kuantan Tengah



a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

- 1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f) Penyiapan rapat-rapat;
- g) Pengadministrasian aset desa;
- h) Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i) Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j) Melaksanakan pelayanan umum.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

- 1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi.
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa.
 - b) Menyusun RAPBDES.
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa.
 - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDESA) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDESA).

- f) Menyusun laporan kegiatan Desa.
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa.
 - b) Menyusun RAPBDESA.
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa.
 - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDESA) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDESA).
 - f) Menyusun laporan kegiatan Desa.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa.
- b) Menyusun rancangan regulasi desa.
- c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
- d) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa.
- f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
- g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa.
- h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- i) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.
 - b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
 - c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
 - d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.

- e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.
- f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna.
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa.
 - b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa.
 - c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa.
 - e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk.
 - f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.
 - g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
 - h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
 - i) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

i. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi.
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa²⁸

²⁸ Tupoksi Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2016

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Wiryo Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas "*the laws and not men shall govern*".

Joeniarto memberi definisi negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasa harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sudargo Gautama menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.²⁹

Dalam kepustakaan, apa yang dimaksud dengan negara hukum sering diterjemahkan dengan istilah *Rechtstaat* atau *rule of law*. Pada paham *Rechtstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental,

²⁹ Bahder Johan Nasution, "*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*", (Bandung: CV. Mandar Jaya, 2012), Cet Ke-2, h. 1.

sedangkan paham *rule of law* bertumpu pada sistem Anglo Saxon atau *common law system*. Ide tentang *Rechtsstaat* mulai populer pada abad ke tujuh belas sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja. Paham *Rechtsstaat* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*.³⁰

Konsep negara hukum "*Rechtsstaat*" lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* atau *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* sejalan dengan lahirnya paham Liberalisme yang berkembang pula pengertian "Negara Hukum Liberal" atau negara hukum dalam arti sempit yang dikatakan oleh Immanuel Kant yakni "*Nachtwederstaat*" atau "Negara Penjaga Malam". Kemudian Friedrich Julius Stahl seorang sarjana Jerman pada tahun 1878 mengoreksi dan menyempurnakan paham negara hukum liberal dengan konsep negara hukum dalam arti luas "Negara Hukum Kesejahteraan" (*Welfarestaat*), dengan unsur-unsur utama:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia

³⁰ *Ibid.*, h. 3.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya pradilan administrasi³¹

Dalam Negara modren, penyelenggaraan kekuasaan Negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*Droit Constitutionnal*). Undang-Undang Dasar atau *Verfassung*, oleh Cral Schmit dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi konstitusi yaitu dimana mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu Negara.³²

1. Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum

a. Konsep *Rechtstaat*

Istila *Rechtstaat* pertama kali dipergunakan oleh Rudolf Von Gneist guru besar Universitas Berlin dalam bukunya yang berjudul “*Das Englische Verwaltungsrecht*”. Dalam buku itu digunakan istilah *Rechtstaat* untuk menunjukkan sistem hukum yang berlaku di Inggris. Ditinjau dari segi perkembangannya, konsep *Rechtstaat* telah dikembangkan dari konsep kalsik ke konsep modren. Ciri-ciri *Rechtstaat* yang klasik (*formalrechtsstaat*) menurut Friederich Julius Stahl adalah:

1. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid vanbestuur*).
4. Adanya peradilan tata usaha negara.³³

³¹ *Seminar Nasional Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 534

³² Ni'matul Huda, DKK, “*Teori Dan Hukum Konstitusi*”, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1999), h. 61.

³³ *Ibid.*, h. 18.

Sementara itu, perkembangan konsep *Rechtstaat* klasik ke arah modern, disebutkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda dunia setelah berakhir Perang Dunia ke II.

b. Konsep *Rule of Law*

Konsep *Rule of Law* menurut A.V. Dicey mengandung tiga unsur pokok yaitu:

- 1) Supermasi absolut atau predominasi dari “*regular law*” untuk menentang pengaruh dari “*arbitrary power*” dan meniadakan kewewenang-wenangan prerogative atau “*discretionary authority*” yang datang dari pemerintah.
- 2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang di laksanakan oleh *ordinary court* ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik perorangan maupun pejabat negara berkewajiban mentaati hukum, tidak ada peradilan administrasi.
- 3) Konstitusi adalah hasil dari “*the ordinary of law of the land*”, bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konskuensi dan hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian rupa, diperluas sehingga, terbatas posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya.³⁴

³⁴ *Ibid.*, h. 24.

2. Konsep Negara Hukum Indonesia

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Uud Tahun 1945, disebutkan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia Indonesia adalah negara hukum kemudian di dalam Penjelasan UUD tahun 1945 disebutkan bahwa Negara RI adalah berdasarkan pada hukum (*Rechtstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dari prinsip yang dimuat dalam hukum dasar tersebut, mengandung arti: kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam praktek ketatanegaraan, dimana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum.

Setelah pustaka menunjukkan, masuknya ide negara hukum (*Rechtstaat*) ke Indonesia, dimulai pada pemerintahan Hindia Belanda. Ide tersebut dituangkan dalam *Regelingsreglement* 1854, menurut Soetandyo Wignyosoebroto. Introduksi *Rechtstaat* pada masa itu dimaksudkan untuk mengefektifkan pendayagunaan hukum kewewenang-wenangan eksklusif. Ide itu di rumuskan dalam Pasal 79, Pasal 88 dan Pasal 89 *Regelingsreglemen* 1854. Pasal 79 menyuratkan asas pembagian kekuasaan, Pasal 88 memerintahkan dilaksanakan asas legalitas dalam hal pembedaan dan Pasal 89 melarang pembedaan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak dan keperdataannya.³⁵

³⁵ *Ibid.*, h. 74.

3. Konsepsi Prismatik

Pancasila merupakan konsep prismatik (meminjam istilah *Free Riggs*) yakni mengambil konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dilakukan dengan kenyataan masyarakat Indonesia. Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah Negara kebangsaan yang religious yang melindungi dan memfasilitasi perkembangannya semua agama yang dipeluk oleh rakyat tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk agama masing-masing.³⁶

Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, tetapi sekaligus mengakui secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial yang tak bisa menjadi manusiawi kalau tidak bisa hidup bersama manusia-manusia lain.³⁷

Sistem Hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule Of Law* (Anglo Saxon) yang didalamnya bertemu ikatan prismatic dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Alam penegakan hukum, system hukum pancasila menghendaki kepastian hukum bahwa keadilan telah ditegakkan. Sistem hukum pancasila menghendaki penegakan keadilan substansial berdasarkan aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial.³⁸

³⁶ Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6.

³⁷ *Ibid.*, h. 7.

³⁸ *Ibid.*, h. 8.

Menurut Jimly Assidique, prinsip Negara Hukum dapat dielaborasi menjadi 12 unsur, yaitu:

- a) Supremasi hukum
- b) Persamaan dalam hukum
- c) Asas legalitas
- d) Pembatasan kekuasaan
- e) Organ-organ pemerintah yang independen
- f) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- g) Peradilan Tata Usaha Negara
- h) Peradilan Tata Negara
- i) peradilan Hak Asasi Manusia
- j) Bersifat demokratis
- k) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- l) Transparansi dan *control sosial*³⁹

4. Ide Negara Hukum Sebagai Suatu Cita Negara

Cita negara merupakan cita yang bersifat kompleks karena meliputi berbagai macam cita, antara lain cita politik, ekonomi, dan sosial budaya. Schaper, seperti diikuti Abdul Hamid S. Attamimi, mengemukakan sebagai berikut:

- a. Cita hukum kekuasaan (*Machstaats*)
- b. Cita hukum berdasarkan hukum (*Rechstaat*)
- c. Cita negara kerakyatan (*Volkstaats*)

³⁹ *Seminar Nasional Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, *Op. Cit.*, h .536.

- d. Cita negara kelas (*Klassestaats*)
- e. Cita negara liberal (*Liberal Staat*)
- f. Cita negara totaliter kanan (*Totaliteire staat van rechts*)
- g. Cita negara totaliter kiri (*Totaliteire staat van links*)
- h. Cita negara kemakmuran (*Welvarsstaat*)⁴⁰

B. Kebijakan (*Freies Ermessen*)

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *Frei* yang artinya bebas, lepas tidak terkait, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sementara itu *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah itu kemudian digunakan secara khas dalam bidang pemerintahan sehingga *Freies Ermessen (Diskresionare)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.⁴¹

Definisi lain yang hampir senada diberikan oleh Nanan Saputra, yaitu suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan pada dasarnya memperkenankan alat administrasi mengutarakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*Doelmatigheid*) dari pada bepegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk campur dalam kegiatan

⁴⁰ Hotma P. Sibuea, "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebiasaan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", (PT. Gelora Aksa Pratama, 2010), h. 7.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Ajagrafindo Persada, 2007), h. 177.

sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Bahsan Mutafa menyebutkan bahwa *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Kepuasan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*Doelmatigheid*) dari pada sesuai dengan hukum yang berlaku (*Rechtmatigheid*).⁴²

Meskipun pemberian *Freies Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *Welfare State*, tetapi dalam keangka negara hukum, *Freies Ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basash mengemukakan unsur-unsur *Freies Ermessen* dalam suatu negara, yaitu:

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas publik.
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri.
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting secara tiba-tiba.
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum.

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan didalam penerapan asas legislatif. Bagi negara

⁴² *Ibid.*, h. 178.

yang bersifat *Welfare State*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Laica Marzuki, *Freies Ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayan publik yang harus diberikan tata usaha negara kepada terhadap kehidupan sosial ekonomi pada warga yang kian kompleks.⁴³

Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang membawa implikasi :

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

⁴³ *Ibid.*, h. 179.

- 5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknnya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.⁴⁴

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.⁴⁵ Menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, *Freies Ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *In Konkrito* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.⁴⁶

⁴⁴ Abu Samah dan Muhammad Ali, "*Hukum Kebijakan Publik*", (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015), h. 28.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 30.

⁴⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 180.

Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Muchsan pembatasan penggunaan *Freies Ermessen* adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
2. Penggunaan *Freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.⁴⁷

J.H. Van Kreveld menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan itu langsung atau tidak langsung, tidak didasarkan kepada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.
- 2) Peraturan itu tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut.
- 3) Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain, tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara.⁴⁸

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Ajagrafindo Persada, 2018, Ed. Revisi, Cet, ke-2), h. 173.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 178.

- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan kepada peraturan kebijaksanaan.
- c. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara *Wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
- d. Peraturan kebijaksanaan disebut berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan kepada *Doelmatig* sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak.
- f. Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat di jumpai dalam bentuk peraturan.⁴⁹

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna, yang berarti:

- a. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengatuan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- b. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengatuan bagi keadaan vakkum perundang-undangan.
- c. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengatuan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomidasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 187.

- d. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengatutan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
- e. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Semenatare itu dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal diantaranya:

- 1 Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan *Deoordelingsvrijheid* (ruang kebebasan bertindak).
- 2 Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti:
 - a. Asas perlakuan yang sama menurut hukum.
 - b. Asas kepatutan dan kewajaran.
 - c. Asas keseimbangan.
 - d. Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan.
 - e. Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan kepentingan publik dan warga masyarakat.
- 5. Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.⁵⁰

Kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan external, yaitu yang mengikat masyarakat.dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 193.

1. Berpedoman kepada kebijaksanaan yang ada.
2. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
3. Berorientasi kemasa depan.
4. Berorientasi pada kepentingan umum.
5. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan arti dan maksud.⁵¹

C. Hak

Hak adalah suatu wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diberikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.⁵²

Menurut Paton hak adalah sebagai suatu kewenangan seseorang yang dilakukan oleh hukum untuk menunaikan kepentingan. Sedangkan hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Houwing memandang hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.⁵³ Menurut Meijers mendefinisikan hak sebagai suatu kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya.⁵⁴ Penduduk (*Ingezetenen*) atau rakyat merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari sebuah negara. Setiap warga negara suatu negara diberikan status kewarganegaraan dari negara tersebut. Seorang agar segera mempunyai kedudukan yang khusus

⁵¹ C.S.T Kansil DKK, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005) Cet, Ke-II, h. 191.

⁵² Zainal Asikin, "*pengantar ilmu hukum*", (jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 115.

⁵³ Peter Muhammad Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 142.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 152.

yaitu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak dan kewajiban. Segara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya.

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut kepada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun keputusan yang ada.⁵⁵

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Konsekuensi logis dari cara hidup yang baik yang menghormati totalitas dan simetri. Hak itu dengan sendirinya diperoleh apabila kewajibannya telah terpenuhi.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Lysa Angraini, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.45-46.

Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.⁵⁶

Menurut Bentham, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang. Menurut Bentham hak adalah anak dari hukum.⁵⁷ Menurut Fitzgerald, ciri-ciri hak yang melekat pada hukum adalah:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) suatu perbuatan. Hal ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. *Commission* dan *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum merupakan titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya.⁵⁸

Hak-hak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Hak-hak yang sempurna dan yang tak sempurna.

Hak yang sempurna adalah yang dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pelaksanaan hukum. Hak yang tidak sempurna

⁵⁶https://www.academia.edu/29028479/JURNAL_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA.docx

⁵⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Op. Cit.*, h. 142.

⁵⁸ Lysa Angrayni, *Op. Cit.*, h. 46-47.

adalah yang diikuti oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluwarsa.

b. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak-hak yang melengkapi hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

c. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

d. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif merupakan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya hak negatif.

e. Hak-hak milik dan hak pribadi

Hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa di alihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.⁵⁹

1. Macam-Macam Hak

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi

⁵⁹ *Ibid.*, h. 48-49.

eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak yaitu hak orisinal dan hak derivatif.⁶⁰ Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak dasar dan hak politik. Hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak dasar yang bersifat klasik dan hak dasar sosial. Dilihat dari keterkaitan antara hak dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak privat yang terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat, yaitu (*Privacy*).

a. Hak orisinal dan hak derivatif

Hak orisinal adalah hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah dengan manusia itu sendiri. Hak orisinal berupa hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik. Dalam hal ini hukum bukan menciptakan hak itu, tetapi melainkan mengakui hak itu. Hak orisinal menjadi landasan tujuan hukum, karena hak orisinal memancarkan aspek fisik dan eksistensial manusia. Untuk mempertahankan hak orisinal itulah dikembangkan norma hukum yang berupa perintah dan larangan yang berkaitan dengan hak tersebut. Perintah dan larangan harus dituangkan dalam aturan hukum yang bersifat kongkrit.

Hak Derivatif adalah hak-hak yang merupakan bantuan hukum. Hak derivatif timbul karena diciptakan oleh undang-undang, diaplikasikan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan dalam perjanjian.⁶¹

⁶⁰Peter Muhammad Marzuki, *Op. Cit.*, h. 158.

⁶¹*Ibid.*, h. 158.

b. Hak Dasar

Frenken memberi pengertian hak dasar sebagai hak yang dimiliki oleh setiap orang dan dijamin bebas dari suasanan campur tangan negara. hak dasar adalah hak yang perlu dituangkan dalam aturan hukum.⁶²

c. Hak Politik

Hak politik berupa hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁶³

d. Hak Privat

Hak privat dibedakan menjadi hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah dapat diberlakukan oleh setiap orang, sedangkan hak relatif hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Objek hak absolut adalah benda, sedangkan objek hak relatif adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak absolut dibagi menjadi hak pribadi, hak kekeluargaan, hak kebendaan, dan hak atas barang-barang tidak berwujud.⁶⁴

f. *Privacy*

Hak atas *Privacy* meliputi kesendirian seseorang, komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, data seseorang, dan persona seseorang.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hl, 169-170.

⁶³ (hak ikut serta dalam pemerintahan secara langsung misalnya, hak untuk dipilih menjadi anggotalembaga politik, yaitu lembaga perwakilan rakyat dan anggota kabinet, hak untuk menjadi kepala pemerintahan dan kepala daerah. hak ikut serta dalam pemerintahan secara tidak langsung misalnya, hak untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih kepala daerah dan memilih kepala negara di negara republik), *Ibid.*., h. 170.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 172.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 177.

2. Hak-hak azasi manusia

a. Sejarah perkembangan

Hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan di mana hak-hak azasi diinjak-injak, timbul keinginan merumuskan hak-hak azasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan sedunia tentang hak-Hak Azasi Manusia) oleh negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan azasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan kekuasaan Raja John itu.⁶⁶
- 2) *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun

⁶⁶ Miram Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: Pt Gramedia Jakarta, 1977), h. 120.

sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*)

- 3) *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
- 4) *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaues Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.

Akan tetapi, dalam abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetus beberapa hak yang lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal ialah empat hak Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of speech*)

2. Kebebasan beragama (*Freedom of religion*)
 3. Kebebasan dari ketakutan (*Freedom from fear*)
 4. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from want*).⁶⁷
- b. Hak-hak azasi di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶⁸ UU yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998.

Ada dua pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai UU, dan tidak perlu dibuat satu UU khusus tentang HAM. Pendapat lain mengatakan bahwa pembetulan UU materi khusus tentang HAM perlu dilakukan mengingat Ketetapan MPR tidak berlaku operasional dan berbagai UU yang ada belum seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, UU tersebut akan berfungsi sebagai UU payung (*umbrella act*) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HAM yang sudah ada selama ini.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, h. 120.

⁶⁸ UU No 39 Tahun 1999

⁶⁹ Bagir Manan, "*Perkembangan Pemikiran Dan Mengatur Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", (Bandung: P.T Alumni, 2006), h. 85.

Karagori HAM yang dilakukan adalah dengan membagi HAM menjadi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan. Sebagaimana umumnya, pengelompokan HAM secara tradisional sesuai dengan perkembangan HAM adalah hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak esensi lainnya adalah pengaturan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga (*non-derogable*) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Perlindungan lebih terhadap HAM menurut ketentuan ini dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin. Selain itu, perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat harus dilindungi.⁷⁰

Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu Piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa Pasal, terutama Pasal 27-31.

Dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan 34 telah dicantumkan, bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*, h. 88.

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran.
3. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
4. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan.
5. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangserta perlindungan kekerasan serta diskriminasi.
6. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
8. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.
12. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamany, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali.

14. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.
15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
18. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan bermemperoleh suatu politik negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

21. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
22. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah "hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
24. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan sains dan peradaban.⁷¹

Selain dari itu di antara tokoh-tokoh masyarakat terdapat perbedaan pendapat mengenai peran hak-hak azasi di dalam negara demokratis.

“pendapat-pendapat waktu itu banyak dipengaruhi oleh *declaration des droits de l'homme et du citoyen* dan liberalisme, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong. Mengenai hal itu Ir. Soukarno pada waktu itu menyatakana sebagai

⁷¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-34, *Op. Cit.*,

berikut: jika kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberallisme dari padanya.”

Sebaliknya Dr. Hatta mengatakan bahwa walaupun yang di bentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan (*machtsstaat* = negara penindas).⁷²

Diterimanya pernyataan serta dua Perjanjian oleh mayoritas Perserikatan Bangsa Bangsa sekaligus menunjukkan dengan jelas bahwa gagasan mengenai perlunya hak-hak azasi manusia dijamin, benar-benar didukung oleh umat manusia. Hal ini juga dirasakan oleh orang Indonesia sendiri, sebab dalam menyusun Undang-Undang Dasar berikutnya, yaitu 1945 dan 1950, ternyata bahwa hak-hak azasi ditambah dan diperlengkap. Undang-Undang Dasar 1949 merupakan Undang-Undang Dasar yang paling lengkap perumusannya dibandingkan dengan dua undang-undang dasar lainnya.

Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat Muhammad yamin dalam buku *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* bahwa “Konstitusi R.I.S dan R.I 1950 adalah satu-satunya dari segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi seperti keputusan UNO itu kedalam Piagam Konstitusi”.⁷³

⁷² Miram Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 127.

⁷³ *Ibid.*, h. 128.

3. Timbul dan lenyapnya hak

Hak yang dimiliki oleh subjek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap atau hapus karena disebabkan oleh beberapa faktor tertentu.

Hak dapat timbul atau lahir apabila ada peristiwa hukum, misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan sebagainya. Adapun timbul atau lahirnya hak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Karena adanya subjek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
- b. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- c. Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
- d. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.⁷⁴
- e. Karena kadaluarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjering*⁷⁵ yang dapat melahirkan hak bagi seseorang, sebaliknya kalau *extinctief verjering* dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

⁷⁴ Lysa Angrayni, *Op.Cit.*, h. 49.

⁷⁵ *acquisitief verjering* (kadaluarsa ekuisitif), yaitu kadaluarsa yang memperoleh hak dapat dilihat dalam Pasal 1963 KUH Perdata yang berbunyi: "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh benda tidak bergerak, bunga dan piutang lainnya yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya"

extinctief verjering (kadaluarsa ekstinktif), yaitu kadaluarsa yang bebas tanggung jawab (melenyapkan kewajiban), dapat dilihat dalam Pasal 1967 KUH Perdata, yang berbunyi "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didaskan kepada itikadnya yang buruk " *Ibid.*, h. 50.

Sedangkan lenyapnya atau hapusnya hak dapat disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu:

- a. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum.
- b. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.
- d. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi.
- e. Kadaluarsa (*verjering*), dapat menghapus hak.⁷⁶

D. Kesejahteraan Sosial

Menurut Soukanto masalah sosial (*Social Problem*) bersumber pada faktor ekonomis, biologis, psikologis dan kebudayaan. Sesuai dengan sumber-sumber tersebut masalah sosial yang merupakan faktor ekonomis meliputi: kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.⁷⁷

Menurut Sinaga dan White menjelaskan masalah kemiskinan ini membedakan kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya alam yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sedangkan buatan terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, h. 51.

⁷⁷ Rianto Adi, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 75.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 77.

Pemberantasan masalah kemiskinan pada dasarnya adalah masalah *bad governance*, yaitu mewujudkan praktek pemerintahan yang berpihak pada masyarakat miskin.⁷⁹

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.⁸⁰ Keadilan berasal dari bahasa Arab (*adil*) yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁸¹

Hal ini juga tidak lepas dari pemerintahnya, pemerintah dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan meningkatkan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualnya.⁸²

Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian lingkungan dapat memberikan kesejahteraan dalam masyarakat.⁸³

⁷⁹ Agus Dwiyanto, DKK, "*Kemiskinan dan Otonomi Daerah*", (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 4.

⁸⁰ C.S.T.Kansil, DKK, "*Sistem Pemerintah Indonesia*", (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2005) Edisi ke-2, h. 149.

⁸¹ Harimanto dan Winarto, "*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 135.

⁸² Abdullah dan Abdul Rozak, "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*", (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), edisi ke-3, h. 160.

⁸³ Harimanto dan Winarto, *Op. Cit.*, h. 177-178.

Sosial Notowidagdo berpendapat bahwa sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Selain itu, menurut Suharto kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social.
2. Institusi, karena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan social.
3. Aktivitas, yakni suatu kekuatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Asuransi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Pulau Godang Kari antara peraturan (*Dass Sollen*) dengan fakta (*Dass Sein*) di lapangan terjadi ketidak sesuaian, dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan meliputi: kriteria pendidikan, kriteria kesehatan dan kriteria kesejahteraan sosial, dan fakta di lapangan pemberian bantuan PKH hanya terfokus kepada kriteria pendidikan di Desa Pulau Godang Kari, sedangkan untuk kriteria kesejahteraan sosial yang terdiri dari komponen lansia berumur 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas, hanya 4 orang lansia yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Beberapa dampak terhadap peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari, mempunyai dampak yaitu: masih banyak masyarakat di Desa Pulau Godang Kari yang belum terdaftar sebagai penerima PKH. Karena, masih banyak lansia yang berumur 60 tahun ke atas yang belum terdata dan tidak mendapatkan PKH, yang menyebabkan beberapa hal yaitu, keterbatasan penerima bantuan kesejahteraan sosial, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH khususnya kriteria kesejahteraan sosial, tidak bejalannya kewajiban penerima PKH khususnya kriteria kesejahteraan sosial.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi masyarakat yang ada di sekitar. Karena salah satu cita-cita Negara Republik Indonesia adalah memakmurkan rakyat Negara Indonesia. Agar terciptanya, maka harus lebih melihat kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Kepada masyarakat di Desa Pulau Godang Kari agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan bantuan dana PKH dengan memberikan data yang se-maksimal mungkin agar pemerintah mudah dalam mengetahui pendataan setiap masyarakat, yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan dana PKH, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan dana PKH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah dan Abdul Rozak, "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*", Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, edisi ke-3
- Abu Samah dan Muhammad Ali, "*Hukum Kebijakan Publik*", Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015
- Abu Samah, "*hukum kebijakan pablik*", Pekanbaru, 2018
- Agus Dwiyanto, DKK, "*Kemiskinan dan Otonomi Daerah*", jakarta: LIPI Press, 2005
- Amirudin Dan Zainal Asikin, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Rajawali Pers: Jakarta, 2010
- Bagir Manan, "*Perkembangan Pemikiran Dan Mengatur Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", Bandung: P.T Alumni, 2006
- Bahder Johan Nasution, "*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*", (Bandung: CV. Mandar Jaya, 2012), Cet Ke-2
- C.S.T Kansil DKK, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 Cet, Ke-II
- Edi Suharto, "*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*", Bandung: Alfabeta.CV, 2013
- Harimanto dan Winarto, "*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*", Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Hotma P. Sibuea, "*Asas Negara Hukum, Peraturan Kebiakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*", (PT. Gelora Aksa Pratama, 2010),
- Kealan, m.s, "*Pendidikan Pancasila*". Yogyakarta: pradigma offiset, 2010
- Lysa Angraini, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Pekanbaru: Suska Press, 2014
- Mahfud MD, "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Miram Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Pt Gramedia Jakarta, 1977
- Ni'matul Huda, DKK, "*Teori Dan Hukum Konstitusi*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1999
- Peter Muhammad Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana Prenada Media Group, 2008

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Ed.1, Cet. 13
- Rianto Adi, “*Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Rianto Adi, “*Sosiologi Hukum*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Ajagrafindo Persada, 2007
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Ajagrafindo Persada, 2018, Ed. Revisi, Cet, ke-2
- Royan, “*Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*”, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial. 2015
- Sugiyono, “*Motode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2012
- Zainal Asikin, “*pengantar ilmu hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Zainuddin Ali, “*Motode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Jurnal atau Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kuantan_Singingi

https://www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/204078-jumlah-bantuan-pkh-dihitung-berdasarkan-beban-keluarga

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.1, H. 29- 34

Jurnal Wacana Kinerja | Volume 21 | Nomor 1/ Juni 2018 73

Seminar Nasional Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Suci Sang Lestari, “Upaya Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mempublikasikan Program Keluarga Harapan” Skripsi Fakultas Dakwa, (Pekanbaru: Fakultas Dakwa, 2016),

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Tupoksi Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2016

DAFTAR DATA SEKUNDER

No	Rumusan Masalah	Data Sekunder
1	Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.(64) - Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi 2018 (65) - Sumber: Kantor Desa Pulau Godang Kari(66) - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial(67) - Ridwan HR, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta: PT. Ajagrafindo Persada, 2007 (69) - Kealan, m.s. <i>"Pendidikan Pancasila"</i>. Yogyakarta: pradigma offiset, 2010 (72)
2	Bagaimana dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Abu Samah dan Muhammad Ali, <i>"Hukum Kebijakan Publik"</i>, Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015 (74) - Zainal Asikin, <i>"pengantar ilmu hukum"</i>, (jakarta: Rajawali Pers, 2012) (77) - C.S.T Kansil DKK, <i>Sistem Pemerintahan Indonesia</i>, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 Cet, Ke-II (78) - Abdullah dan Abdul Rozak, <i>"Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani"</i>, Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, edisi ke-3 (80) - Harimanto dan Winarto, <i>"Ilmu Sosial dan Budaya Dasar"</i>, Jakarta: Bumi Aksara, 2012 (80)

DAFTAR DATA PRIMER

No	Rumusan Masalah	Data Primer
1	Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara dengan Bapak Andika, (wawancara), 17 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apa peran Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial? (65) b. Apakah dana bantuan PKH lancar setiap bulannya? (66) ▪ Wawancara dengan Bapak Fahrul, Kepala Desa Pulau Godang kari (Wawancara), 19 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah yang dimaksud dengan PKH di Desa Pulau Godang Kari? (67) b. Apa saja syarat masyarakat untuk mendapat PKH? (71) ▪ Wawancara dengan Iuk Jo Sia, yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial, (wawancara), 17 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah bantuan PKH lancar diterima setiap tahunnya? Dan di pergunakan untuk apa? (67) ▪ Wawancara dengan Ibuk Sakima, yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial, (wawancara), 17 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah bantuan PKH yang diterima dapat membantu Ibuk? (67) • Wawancara dengan Ibuk Nurmiati dan Roslima, yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial, (wawancara), 17 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada bantuan lain yang ibuk terima setiap bulannya? (67) • Wawancara dengan Roslima, yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial, (wawancara), 19 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah terlaksana kewajiban pemeriksaan kesehatan sekali dalam setahun terhadap penerima bantuan kesejahteraan sosial? (68) • Angket terhadap pemberian bantuan kesejahteraan sosial di Desa Pulau Godang kari. (69,70,) • Wawancara dengan Bapak Impis, Ketua RW Desa Pulau Godang kari, (Wawancara), 18 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah bantuan PKH khususnya kese-

		jahteraan sosial sudah berjalan semestinya di desa Pulau Godang Kari? (71)
2	Bagaimana dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara dengan Bapak Andika, (wawancara), 17 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Kenapa masih banyak lansia yang belum mendapatkan PKH? (74) b. Bagaimana kerja Dinas Sosial dalam melaksanakan PKH di Masyarakat? (76) ▪ Wawancara dengan Bapak Fahrul, Kepala Desa Pulau Godang kari (Wawancara), 19 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apa peran desa dalam menjalankan PKH di bidang kesejahteraan sosial? (75) • Wawancara dengan Ibuk Neti, Masyarakat Pulau Godang kari (Wawancara), 21 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pandangan Iuk tentan bantuan PKH khusunya kriteria kesejahteraan sosial? (74) • Wawancara dengan Ibuk Simit, Masyarakat Pulau Godang kari (Wawancara), 21 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apa harapan Ibuk tentang bantuan PKH khusunya Kriteria Kesejahteraan sosial? (75) • Wawancara dengan Ibuk Elan, Saudari penyandang Disabilitas Pulau Godang kari (Wawancara), 21 Mei 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apa yang ibuk harapkan dari bantuan PKH dalam kriteria kesejahteraan sosial? (75)

FOTO DOKUMENTASI



Nama : Pak Andika
Status : Pendamping PKH



Nama : Fahrul
Status : Kepala Desa Pulau Godang Kari



Nama : Impis
Umur : 50 tahun (Ketua RW)



Nama : Simit
Umur : 79 tahun



Nama : Roslima
Umur : 76 Tahun (Penerima PKH)



Nama : Jo Sia
Umur : 81 Tahun (Penerima PKH)



Nama : Nurmiati
Umur : 79 Tahun (penerima PKH)



Nama : Sakima
Umur : 85 Tahun (penerima PKH)



Nama : Isa Arana
Umur : 71 Tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Yunus bahari
Umr : 84 tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Juriati
Umur : 68 tahun (tidak meneima PKH)



Nama : Simanidar
Umur : 86 Tahun (Tidak Menerima PKH)



Nama : Siti Jubaidah
Umur : 78 Tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Suaiba
Umur : 79 tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Wirdati
Umur : 76 Tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Anizar
Umur : 72 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Hairana
Umur : 70 Tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Yasmanidar
Umur : 66 Tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Baidrus
Umur : 63 tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Erpeni
Umur : 65 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama ; Yulinar
Umur : 69 tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Nurhayati
Umur : 69 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Surai
Umur : 68 tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Ihsan
Umur : 79 Tahun (tidak menerima PKH)



Nama : Hartini
Umur : 61 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Ayub
Umur 83 tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Hairana
Umur : 72 tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Suraini
Umur : 71 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Jamal
Umur : 75 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Roana
Umur : 73 Tahun (tidak mendapat PKH)



Nama : Neti
Umur : 74 Tahun (Tidak mendapat PKH)



Nama : Abdul Salam
Umur : 56 tahun (penyandang disabilitas)

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN**" yang ditulis oleh :

Nama : NURLIANI APRILA
NIM : 11527202344
Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

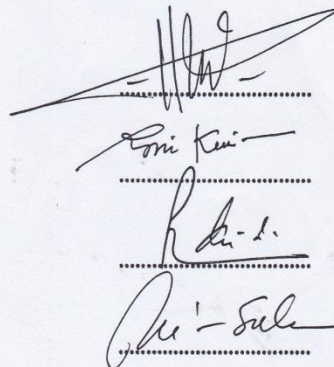
Pekanbaru, 9 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL

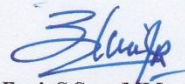
Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji 1
Lovelly Dwina Dahan, SH., MH

Penguji 2
Hj, Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui,
Kabag Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURLINI APRILA

NIM : 11527202344

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA
HARAPAN

Pembimbing : Nur Hidayar, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Oktober 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Anwar Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5134/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURLIANI APRILA
NIM : 11527202344
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1/005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/23301
T E N T A N G



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5161/2019 Tanggal 24 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

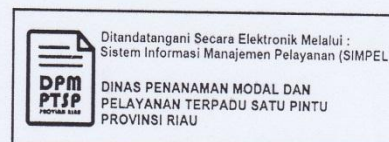
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURLIANI APRILA |
| 2. NIM / KTP | : | 11527202344 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PULAU
GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPTSPTK-PTSP/N/2019/203

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/23301 Tanggal 28 MEI 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NURLIANI APRILA**
NIM : 11527202344
Jurusan : ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : **DESA PULAU GODANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Pih. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH,S.Sos.MM
Pembina IV.a
NIP 19750806200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA PULAU GODANG KARI

Alamat Kantor : Jalan Utama Desa Pulau Godang Kari Kode Pos 29562

REKOMENDASI

Nomor : 01/PG/VI/2019/450

Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, menindak lanjuti Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 071/DPMPTSPK-PTSP/VI/2019/203 Tanggal 29 Mei 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melaksanakan Penelitian di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah kepada :

N a m a	: NURLIANI APRILA
NIM	: 11527202344
Jurusan	: Ilmu Hukum
	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: " Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah".

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Kaur Pemerintahan Desa Pulau Godang Kari.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak terkait, perangkat desa dan masyarakat diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, terima kasih.

Dikeluarkan di : Pulau Godang Kari
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DESA PULAU GODANG KARI

FAHRUL

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Penulis bernama **NURLIANI APRILA** dilahirkan pada tanggal 13 April 1996 di Desa Pulau Godang Kari, kecamatan kuantan Tengah, Kabutan Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Impis dan Ibunda Zulmainar . Merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara. Masuk sekolah dasar pada tahun 2002 di SDN 026 Desa Pulau Godang Kari.

Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan ke SMP 004 Pintu Gobang Kari, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan sekolah di SAM N 1 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SBMPTN) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ilmi Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2015-2019

Bulan Juli sampai agustus 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Geringging Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi. Melaksanakan penelitian pada bulan Mei 2018 dengan judul, ***Pelaksanaan Pemberian bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*** akhirnya pada 12 September Penulis di Munaqasahkan dalam siding Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga (SH), semoga hasil dari penelitian ini bermamfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Amin yaa rabhal 'alamin.....

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.